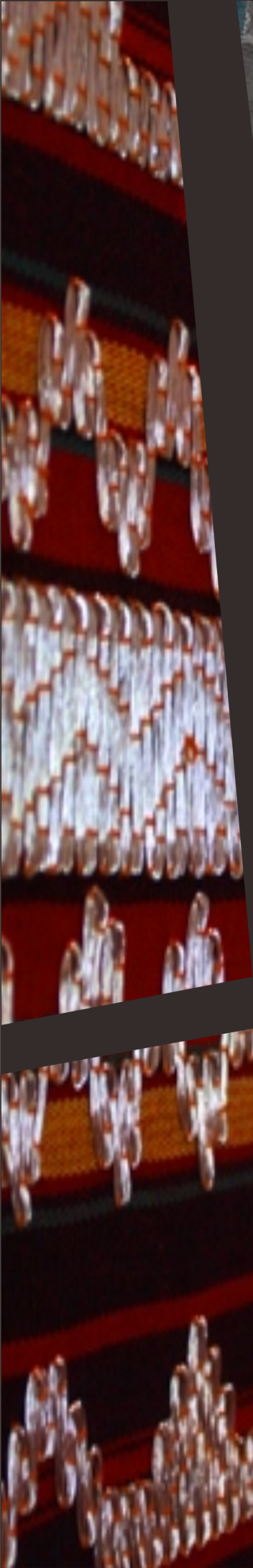
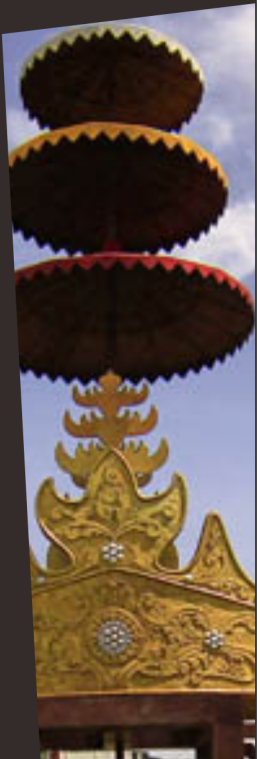




Rencana Kerja Tahun 2023



Bappeda





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Mengacu pada pasal 11 ayat (3), pasal 15 ayat (1) dan pasal 126 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamantkan bahwa Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) secara tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra). Memperhatikan hal tersebut, maka dalam rangka memelihara kesinambungan perencanaan pembangunan, Renja BAPPEDA tahun 2023 disusun dengan mencermati hasil capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan.

Selanjutnya, untuk menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan, penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian target dari indikator kinerja dalam Perubahan Renstra BAPPEDA Tahun 2019-2024. Lebih lanjut, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam Renja BAPPEDA tahun 2023 akan menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BAPPEDA pada R-APBD T.A. 2023.

Akhir kata, kami berharap semoga Renja ini bermanfaat dan memberi kontribusi dalam pencapaian visi - misi pembangunan di Provinsi Lampung.

KEPALA BAPPEDA,



Ir. MULYADI IRSAN, M.T

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011





RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 (keempat) dari Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan disusun dengan merujuk pada Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dimana nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatannya mengacu pada Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka indikator, satuan dan target kinerja yang terdapat pada Renja Tahun 2023 telah menyesuaikan peraturan tersebut. Pada tahun 2023 mendatang BAPPEDA Provinsi Lampung akan melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan dengan rencana alokasi anggaran Rp. 34.104.825.423,-

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirancang dalam Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 akan diarahkan pada pencapaian 3 (tiga) Sasaran kinerja sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 dan menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam mewujudkan Visi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu ***“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”***

Bandar Lampung, Juli 2022





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel dan Daftar Gambar	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	8
2.2 Capaian Kinerja Sasaran Renstra.....	16
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	36
2.5 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.....	40
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	50
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional.....	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA Provinsi Lampung.....	53
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	56
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	64
4.1 Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung.....	64
4.2 Rencana Kerja dan Sub Kegiatan Prioritas BAPPEDA	65
BAB V. PENUTUP	77
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja.....	77
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	78
5.3 Rencana Tindaklanjut.....	78

LAMPIRAN





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian IKU BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021.....	16
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021.....	30
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Tahun 2019-2024..	36
Tabel 2.4	Analisis Lingkungan Internal.....	38
Tabel 2.5	Analisis Lingkungan Eksternal.....	39
Tabel 2.6	Reviu terhadap RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023.....	42
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja Perubahan RPJMD.....	53
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA.....	55
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024.....	57
Tabel 4.1	Prioritas BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Lampung.....	2
Gambar 2.1	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021.....	8
Gambar 2.2	Capaian Kinerja IKU Sasaran I.....	17
Gambar 2.3	Capaian Kinerja IKU Sasaran II.....	23
Gambar 2.4	Capaian Kinerja IKU Sasaran III (Pendukung).....	29
Gambar 3.1	Cascading Misi P RPJMD s/d Tujuan dan Sasaran BAPPEDA....	54
Gambar 4.1	Visi dan Misi Provinsi Lampung.....	64





PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Provinsi Lampung disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Dari sisi proses, penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Lampung dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan seperti koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2023 melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

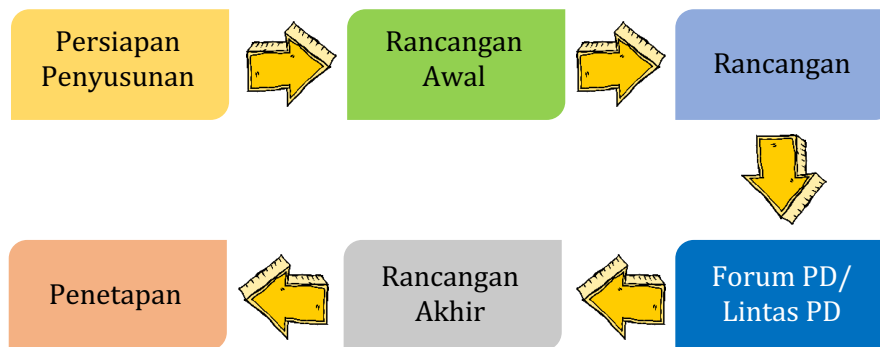
1. Persiapan penyusunan

- Pembentukan Tim Penyusun Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023.
- Pengumpulan materi (hasil evaluasi Renja 2021, pengendalian kegiatan tahun 2021 , dan Rancangan RKPD 2023).





2. Penyusunan rancangan
 - Koordinasi dengan Bidang, Pejabat Fungsional Perencana.
 - Desk dengan pengampu kegiatan.
3. Penyusunan rancangan
 - Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023.
 - Masukan dari pelaksana kegiatan di BAPPEDA Provinsi Lampung.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - Melaksanakan FGD dengan mengundang : Pemangku Kepentingan yang terkait
5. Perumusan rancangan akhir
 - Penyempurnaan oleh Tim
 - Diverifikasi oleh Tim Penyusunan RKPD Provinsi Lampung
6. Penetapan



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Lampung

Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah penjabaran dari Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung 2019-2024. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2023 serta mendasarkan pada Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan RPJPD Provinsi Lampung 2005 - 2025. Selain itu dokumen lain yang dijadikan perhatian dalam penyusunan adalah RPJMN Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDA Provinsi





Lampung tahun 2023, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat, target kinerja dan ketersediaan alokasi anggaran.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 4) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
- 7) Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;





- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
- 11) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Pada perangkat Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- 12) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 14) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 15) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada





BAPPEDA Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Adapun, tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2023 adalah :

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2023 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021;
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 pada tahun ke-4 periode Tahun 2023;
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, Pada Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja BAPPEDA dengan Program prioritas RKPD dan Perubahan Renstra BAPPEDA 2019-2024.

1.2 Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan





Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU, pada bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu :

- 2.1 **Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya;
- 2.2 **Analisis Kinerja Pelayanan OPD**, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;
- 2.3 **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**, memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan beberapa hal yang menjadi pokok perhatian yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 2.4 **Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2023**, memuat Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2023 terkait kebutuhan program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
- 2.5 **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**, menjelaskan unsur BAPPEDA sebagai pendukung Pemerintah





BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**, pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, pada bagian ini, kegiatan dan sub kegiatan dirumuskan dalam pemetaan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung**, berisikan tema prioritas pada RKPD Tahun 2023 serta keselarasan Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja BAPPEDA Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.
- 4.2 Rencana Kerja dan Sub Kegiatan Prioritas BAPPEDA Provinsi Lampung**, menyajikan Sub Kegiatan Prioritas yang mengampu Indikator Kinerja pada Tahun 2023.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.





EVALUASI HASIL PELAKSANAAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun Lalu

Pada Tahun 2021 BAPPEDA Provinsi Lampung melaksanakan 3 program, 13 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan dalam mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2021. Anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp. 31.982.150.950,- yang terbagi dalam sasaran utama 1 sebesar Rp. 2.318.172.400,- dan sasaran utama 2 sebesar Rp. 4.506.882.430,- serta sasaran pendukung sebesar Rp. 25.157.096.120,- dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 29.252.044.398,-.



Gambar 2.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa realisasi kinerja mencapai 99,49% dengan 45 sub kegiatan yang mencapai 100% dan 4 sub kegiatan yang tidak mencapai 100% dengan tingkat persentase paling rendah 90,29%. Untuk melihat kinerja dan pembiayaan selama tahun 2021 dapat di uraikan sebagai berikut:





I. Sasaran Utama 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

Sesuai dengan diagram disamping untuk sasaran ke 1 pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp. 2.318.172.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.139.871.900,-. Pada Sasaran Utama I terdiri dari 3 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 100%.



Analisis keberhasilan kinerja pada Sasaran Utama I sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasi terkait perencanaan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan Musrenbang RPJMD dengan tingkat capaian 100%;



Musrenbang RKPD 2022 dan Musrenbang Perubahan RPJMD 2019-2024

3. Jumlah Dokumen RKPD 2022, Dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024, Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 dengan tingkat capaian 100%.





2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Jumlah keterisian E-Database n-1 dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah Upload Informasi Geospasial Tematik pada Aplikasi Geoportal Satu Peta Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah pembinaan Kabupaten/ Kota terkait Satu Data Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Publikasi Data Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian 100%.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Jumlah Laporan Dekon/TP/DAK dan Laporan Monitoring dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang dimonitoring dan dokumen evaluasi RKPD Tahun 2020 serta evaluasi RPJMD Tahun 2019-2024 dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Musrenbang Kabupaten/Kota dan Dokumen Hasil Fasilitasi RKPD Murni dan RKPD perubahan Kab/Kota dengan tingkat capaian 100%.





II. Sasaran Utama 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Sesuai dengan diagram disamping untuk sasaran ke 2 pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp. 4.506.882.430,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.590.267.000,-. Pada Sasaran Utama II terdiri dari 3 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Analisis keberhasilan kinerja pada Sasaran Utama II sebagai berikut :



1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan dan Dokumen Perencanaan terkait pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah Dokumen Proceeding FGD di Bidang Pemerintahan di Bidang Pemerintahan, Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Dokumen Kajian Revitalisasi SMK Unggulan Terpadu, Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022 dan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung Jangka Menengah Tahun 2021-2024 dengan tingkat capaian 100%;



Pertemuan Aksi Kovergensi Stunting Provinsi Lampung





3. Jumlah Dokumen laporan SDG's Tahun 2020, Dokumen Laporan Monev Smart Village dan laporan monitoring evaluasi perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat (LP2KD, Laporan Grand Design Kependudukan, Laporan RAD PG) dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Dokumen Perencanaan terkait pembangunan Bidang Sumberdaya Manusia dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah dokumen proceeding FGD Perencanaan Pembangunan Bidang Sumberdaya Manusia dan Dokumen Penyusunan Masterplan Smart School dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monev Bidang Pembangunan Manusia dengan tingkat capaian 100%.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

1. Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Buku Peluang Investasi dan Komoditi Unggulan Daerah dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah Laporan pelaksanaan asistensi sektor penanaman modal, tenaga kerja, pendapatan dan keuangan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen Laporan Monev dan Buku Statistik Perekonomian dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Laporan FGD pengembangan pariwisata Provinsi Lampung dan Laporan FGD pengembangan kawasan industri dengan tingkat capaian 100%;



Penyusunan Peta Peluang Investasi Kawasan Industri Pesawaran





5. Jumlah dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan serta Perkebunan dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah Dokumen hasil FGD di sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan dengan tingkat capaian 100%;
7. Jumlah dokumen Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB dengan tingkat capaian 100%;
8. Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Program Unggulan lingkup Industri dan Pariwisata dengan tingkat capaian 100%;

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Dokumen Laporan koordinasi perencanaan di Bidang Kewilayahan dan Dokumen Kebijakan KLHS pada Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah Dokumen pelaporan Asistensi OPD di Bidang Kewilayahan, Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Gas Rumah Kaca (PEP GRK) dan Dokumen Kajian Catchment Area Batu Tegi dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan dengan tingkat capaian 100%.



**III. Sasaran Pendukung : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Sesuai dengan diagram disamping untuk sasaran pendukung pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp. 25.157.096.120,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.521.905.498,-. Pada Sasaran Pendukung terdiri dari 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 98,98%. Analisis keberhasilan kinerja pada Sasaran Pendukung sebagai berikut :

**1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Jumlah dokumen perencanaan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi Kinerja dengan tingkat capaian 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan

1. Jumlah Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD (semesteran dan tahunan) dengan tingkat capaian 100%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi dengan tingkat capaian 97,50%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan tingkat capaian 100%;





2. Jumlah layanan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik dengan tingkat capaian 100%;
 3. Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan dengan tingkat capaian 100%;
 4. Jumlah layanan pengadaan ATK dengan tingkat capaian 100%;
 5. Jumlah layanan makan minum dengan tingkat capaian 100%;
 6. Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan dengan tingkat capaian 90,29%.
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1. Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan tingkat capaian 100%;
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1. Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan tingkat capaian 100%;
 2. Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja dengan tingkat capaian 100%;
 3. Jumlah layanan administrasi keuangan dan pelayanan umum kantor dengan tingkat capaian 100%.
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan tingkat capaian 94,12%;
 2. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan tingkat capaian 93,14%;
 3. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan tingkat capaian 100%.





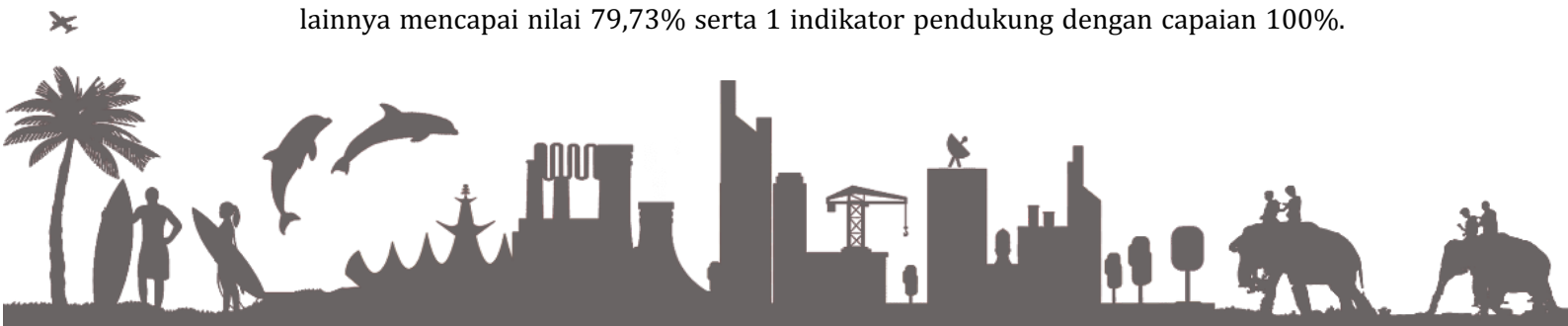
2.2 Capaian Kinerja Sasaran Renstra

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024. Capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dengan tingkat capaian dan realisasi capaian tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian IKU BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SASARAN UTAMA						
I	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Penetapan RKPD sesuai target yang ditetapkan.
		Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%	23,92%	79,73%	Diukur berdasarkan usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang diakomodir dalam RKPD 2022 sebanyak 201 usulan dari 840 total usulan awal.
II	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%	100%	100%	Target telah dicapai dimana indikator sasaran Renstra PD telah selaras dengan indikator sasaran pada Perubahan RPJMD 2019-2024
		Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100%	100%	100%	Target telah tercapai berdasarkan indikator sasaran Renja PD sebanyak 1.951 telah selaras dengan indikator sasaran pada RKPD
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	85 %	85%	100%	Target telah terpenuhi, dimana sebanyak 85% atau 17 indikator dari 20 Indikator realisasinya telah diatas 95%
SASARAN PENDUKUNG						
I	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA.	Nilai SAKIP BAPPEDA	BB	BB	100%	Penilaian nilai SAKIP 2020 berdasarkan LHE dari Inspektorat dilaksanakan pada awal tahun 2021

Dari 5 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung, kinerja yang telah mencapai 100% sebanyak 4 indikator, 1 indikator lainnya mencapai nilai 79,73% serta 1 indikator pendukung dengan capaian 100%.





Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sasaran Utama 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

Proses perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung yang telah dilakukan meliputi : Forum Gabungan SKPD Provinsi, Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dan Kota, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Indikator kinerja sasaran 1 ini terdapat 2 indikator sasaran yaitu :

1. Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu;
2. Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah			
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	30 %	23,92 %	79,73
↓	↓	↓	↓
1 Program, 3 Kegiatan, 10 Sub Kegiatan	Pagu Program (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	2.318.172.400	2.139.871.900	92,31

Gambar 2.2 Capaian Kinerja IKU Sasaran 1

Indikator sasaran 1.a adalah Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu. Indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 2021.





Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan alasan sebagai berikut :

- a. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
- b. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- c. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD dengan peran strategis sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan beberapa tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD;





- c. Penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh PD untuk menyusun rancangan Renja PD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD provinsi, dan mengacu pada RPJMN. Setelah rancangan awal RKPD disusun, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja PD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana.

Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja PD serta untuk mensinergikannya prioritas dengan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan Provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.

Selain itu, kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah karena beberapa karakteristik yaitu kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah dan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu. Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2021, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jbaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik





secara langsung maupun tidak langsung terhadap rencana pembangunan di daerah termasuk di Provinsi Lampung.

Meskipun Undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintah pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas dalam penyusunan RKPD yang mempunyai tujuan pokok yaitu menyelaraskan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas masing-masing PD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja PD.

Begitu pun penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pada RKPD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. RKPD Tahun 2022 Provinsi Lampung merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025.

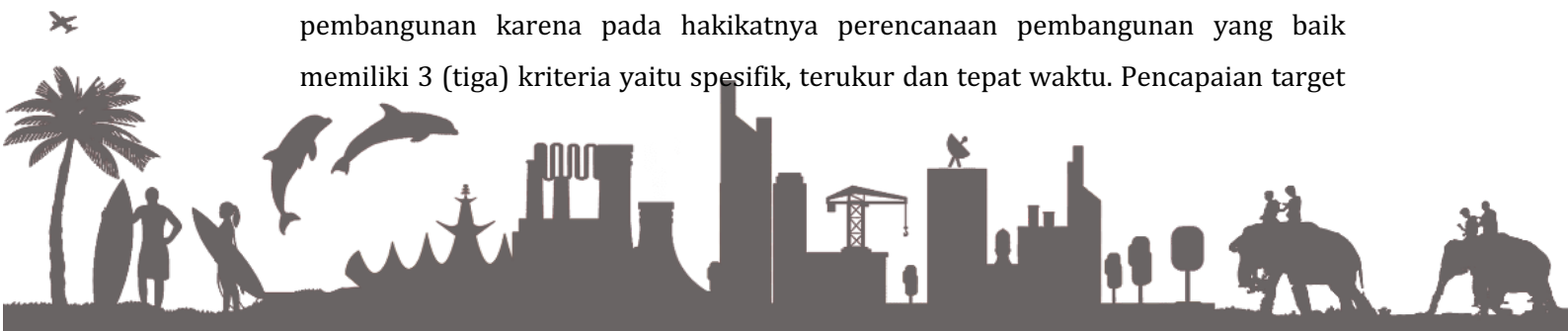
Kompleksitas

tahapan penyusunan RKPD terkait indikator sasaran Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan pencapaian target 100% merupakan suatu pencapaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung dalam bidang perencanaan



Konsultasi publik penyusunan RKPD 2022

pembangunan karena pada hakikatnya perencanaan pembangunan yang baik memiliki 3 (tiga) kriteria yaitu spesifik, terukur dan tepat waktu. Pencapaian target





indikator ini secara konsisten diraih sejak tahun pertama periode RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Unsur ketepatan waktu menjadi sangat penting untuk meminimalkan berbagai hambatan pelaksanaan pembangunan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di eksternal lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung untuk mencapai target tersebut melalui pelaksanaan tahapan-tahapan penyusunan RKPD antara lain persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

Indikator sasaran 1.b adalah Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%. Adapun realisasinya adalah sebesar 23,92 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 79,73%. Indikator ini diukur berdasarkan usulan pokok-pokok pikiran DPRD dan usulan Kabupaten/ Kota yang diakomodir dalam RKPD 2022 sebanyak 201 usulan dari 840 total usulan awal.

Usulan pokok pikiran DPRD merupakan bagian proses perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang tertuang pada Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung dalam penyusunan RKPD Tahun 2022.

Pada tahun 2020, capaian indikator adalah sebesar 98.16%, penurunan capaian ini terjadi akibat dampak pandemi COVID-19 sehingga pemerintah fokus terhadap kegiatan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Sebagaimana diketahui, tahun 2022 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dan RPJMN 2020-2024 merupakan momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional dalam mengembangkan sektor-sektor produktif yang dapat memperkuat kemandirian masyarakat, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit ketimpangan antar kelompok dan antar wilayah. Disatu sisi, untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022 disusun dengan mencermati capaian pembangunan pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan, seperti yang saat ini kita hadapi adanya





wabah pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Disisi yang lain, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

2. Sasaran Utama 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Proses implementasi mulai dari perencanaan, monitoring serta evaluasi dimasing-masing sektor yaitu ekonomi, pembangunan manusia dan infrastruktur dalam pembangunan Provinsi Lampung. Indikator kinerja sasaran 2 ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu :

1. Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%;
2. Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%;
3. Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 85%.





Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.			
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	100 %	100 %	100
Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD	100 %	100 %	100
Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	85 %	85 %	100
↓	↓	↓	↓
1 Program, 3 Kegiatan, 20 Sub Kegiatan	Pagu Program (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.506.882.430	3.590.267.000	79,66

Gambar 2.3 Capaian Kinerja IKU Sasaran 2

Indikator sasaran 2.a adalah Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 100 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 100% dimana indikator sasaran Renstra OPD telah selaras dengan indikator sasaran pada Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) atau Organisasi Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Seperti diketahui Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan PD, Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-





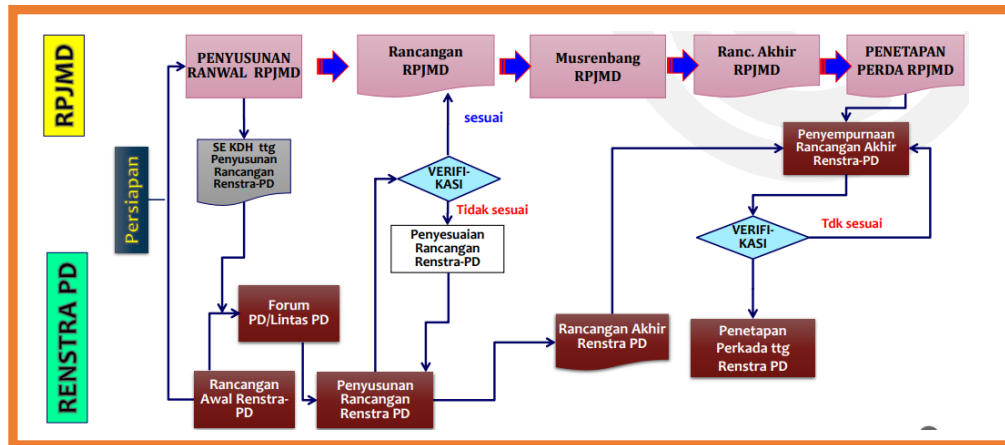
5 tahun (jangka menengah) sehubungan dengan tugas dan fungsi PD. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Tujuan penyusunan renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah. Selengkapnya mengenai tujuan disusunnya Renstra sebagai berikut :

- a. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
- b. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Dengan kata lain, Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).





Keterkaitan RPJMD dengan Renstra PD

Indikator Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD 100% yang diraih Bappeda Provinsi Lampung pada tahun 2020 dan 2021 merupakan implikasi dari keberhasilan perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung, dengan adanya keselarasan renstra perangkat daerah dan RPJMD maka dapat memudahkan pencapaian target pembangunan pimpinan daerah yang di rumuskan dalam periode RPJMD.



Desk Perubahan Renstra PD 2019-2024

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2021 melakukan penyusunan dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024, sejalan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Bappeda Provinsi Lampung mendorong seluruh PD agar indikator Renstranya selaras terhadap RPJMD. Selain itu, dalam menjaga keselarasan RPJMD dan Renstra dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) sehingga Sub Kegiatan diluar aplikasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.





Indikator sasaran 2.b adalah Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasinya adalah sebesar 100 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 100% dimana indikator sasaran Renja OPD telah selaras dengan indikator sasaran pada RKPD. Capaian indikator ini diukur berdasarkan indikator sasaran Renja OPD sebanyak 1.951 telah selaras dengan indikator sasaran pada RKPD.

Rencana kerja PD (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai acuan organisasi perangkat daerah (PD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, PD harus menyusun Rencana Kerja (Renja - PD). Rencana Kerja-PD disusun berdasarkan Rencana Kerja yang tertuang dalam Renstra PD dan mengacu pada RPJMD dan RKPD serta Renja Provinsi sesuai dengan bidang urusan PD.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Proses penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi. Oleh karena itu penyusunan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, dan Renstra PD. Renja PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD. Oleh karena itu penyelarasan indikator renja PD dengan RKPD





merupakan suatu hal penting dalam pencapaian target pembangunan sehingga dapat direalisasikan.



Desk Renja PD Tahun 2022

Dalam dua tahun terakhir (2020 dan 2021), Bappeda Provinsi Lampung berhasil menyelaraskan indikator renja PD dengan indikator RKPD dengan tingkat capaian 100% atau dengan kata lain seluruh indikator renja PD di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung sudah selaras dengan indikator RKPD Provinsi Lampung. Hal ini juga memberikan *impact* terhadap perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung yang semakin baik. Dengan adanya keselarasan indikator renja PD dan RKPD maka target pembangunan yang tertuang dalam renjana kerja tahunan dapat lebih mudah dicapai dan lebih mudah diukur. Upaya yang dilakukan Bappeda Provinsi Lampung dalam menjaga keselarasan indikator Renja PD dengan indikator RKPD melalui kegiatan desk renja PD secara intensif dengan PD terkait.

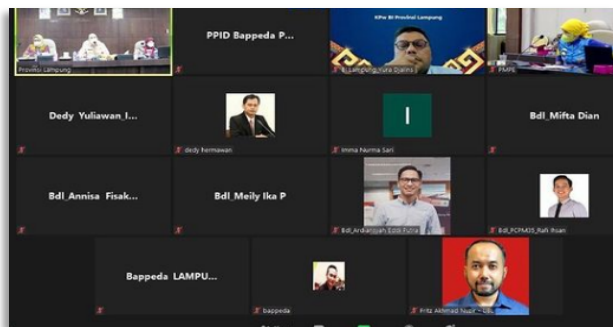
Indikator sasaran 2.c adalah Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 85% atau sebanyak 17 indikator dari 20 indikator yang ditargetkan mencapai 95%. Adapun realisasi sampai dengan Bulan Februari tahun 2022, sebanyak 17 indikator sudah tercapai dengan tingkat capaian diatas 95% sehingga realisasi capaian adalah sebesar 100%.

Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang berorientasi pada hasil dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.





Indikator kinerja daerah Provinsi Lampung dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Daerah per urusan dalam RKPD Provinsi ditetapkan berdasarkan IKU dan IKD yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Target IKU dan IKD Provinsi Evaluasi hasil Pelaksanaan RPJMD dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerja utama pembangunan daerah yang mengindikasikan ukuran keberhasilan pencapaian RPJMD selama periode 2019-2024, tingkat pencapaian indikator kinerja utama tersebut pertahun merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan.



FGD indikator pembangunan PRPJMD 2019-2022

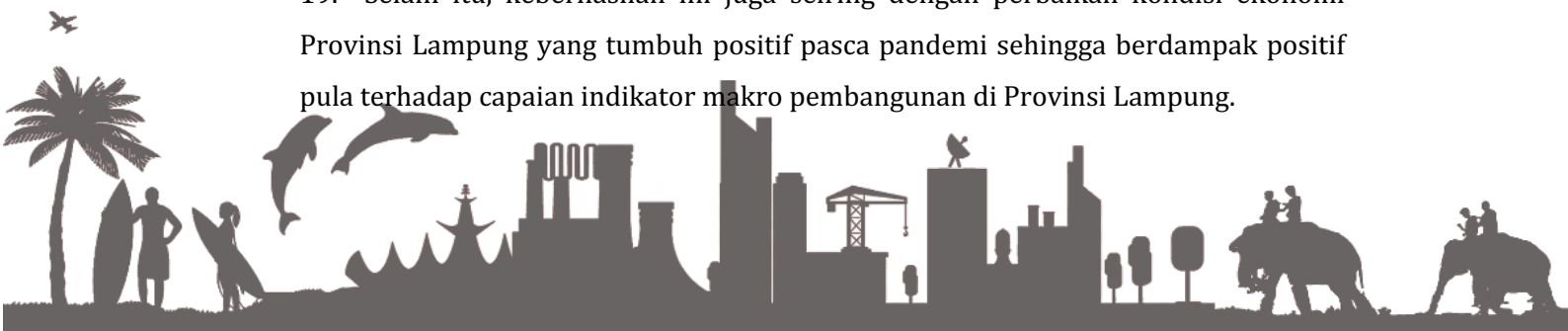
Persentase capaian indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai di tahun 2020 adalah sebesar 64%, dibandingkan dengan tahun 2021 tingkat capaian



Konsultasi publik PRPJMD 2019-2022

ini naik menjadi 100%. Peningkatan capaian ini tidak lepas dari keberhasilan BAPPEDA Provinsi Lampung sebagai *leading sector* penyelesaian dokumen Perubahan RPJMD dimana jumlah indikator pembangunan dalam Perubahan RPJMD 2019-

2024 yang semula berjumlah 33 (tiga puluh tiga) menjadi 20 (dua puluh), 20 indikator pembangunan dalam PRPJMD telah disesuaikan dengan dinamika ekonomi nasional dan Provinsi Lampung terutama setelah terimbas dampak pandemi COVID-19. Selain itu, keberhasilan ini juga seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi Provinsi Lampung yang tumbuh positif pasca pandemi sehingga berdampak positif pula terhadap capaian indikator makro pembangunan di Provinsi Lampung.





Sasaran Pendukung : Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA

Indikator pendukung ini merupakan indikator rutin yang diukur melalui penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai BAPPEDA dalam 1 tahun, Penyusunan laporan perencanaan, evaluasi, keuangan serta asset. Target indikator ini merupakan nilai SAKIP yang ingin dicapai pada tahun 2019 yaitu predikat “BB”. Adapun realisasi kinerjanya telah mencapai target 100 % karena hasil predikat tersebut akan didapat melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing OPD pada Bulan Juli Tahun 2021

Sasaran 3 (Pendukung) : Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA			
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Nilai SAKIP	BB	BB	100
↓	↓	↓	↓
1 Program, 7 Kegiatan, 19 Sub Kegiatan	Pagu Program (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.157.096.120	23.521.905.498	93,50

Gambar 2.4 Capaian Kinerja Sasaran 3 (Pendukung)





Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021
BAPPEDA Provinsi Lampung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021					
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	01				PERENCANAAN									
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %							
5	01	02	01.01		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %							
5	01	02	01.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 Berita Acara	48 OPD	48 OPD	100%	48 OPD	100%		
5	01	02	01.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	4 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	100%		
5	01	02	01.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen RKPD (Murni dan Perubahan)	3 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	100%		
5	01	02	01.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	100 %							
5	01	02	01.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan data dan informasi serta keterisian E-Database N-1	3 Masukan	74%	80%	74%	92,50%	70%	70%	100%
5	01	02	01.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah pengelola data dan informasi di SKPD serta jumlah Dokumen kajian PNPB Data Spasial Provinsi Lampung dan Dokumen Peta Tematik	75 Orang	150 Peta	100 Peta	100%	50 Peta	50 Peta	100%	
5	01	02	01.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola data dan informasi di Kabupaten/ Kota	60 Orang	---	---	---	---	15 Kab/ Kota	15 Kab/ Kota	100%
5	01	02	01.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan dan Dokumen Satu Data Indonesia (SDI)	2 Buku	6 Publikasi	6 Publikasi	100%	6 Publikasi	6 Publikasi	100%	
5	01	02	01.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota	100%							
5	01	02	01.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Dekon/TP/ DAK dan laporan monitoring	2 Laporan	4 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	



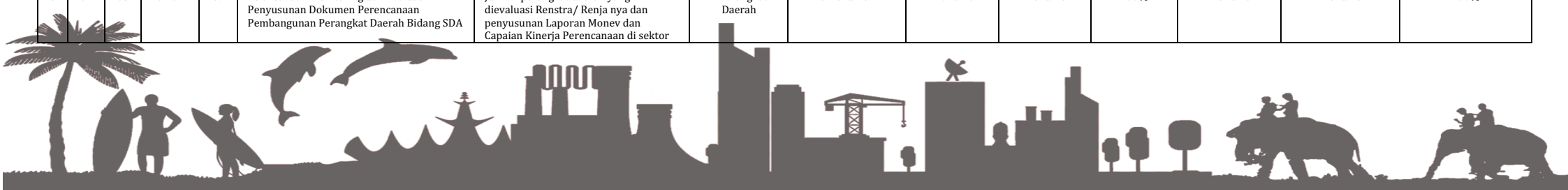


Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5 01 02 01.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Program serta Kegiatan APBD yang dimonitoring dan Dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2022	3 Dokumen	5 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
5 01 02 01.03 04	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitas Musrenbang Kab/ Kota, Dokumen hasil fasilitas RKPD dan RKPD Perubahan Kab/Kota	3 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS SUBSTANSI DAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %							
5 01 03 01.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	100 %							
5 01 03 01.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 01 03 01.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan dokumen asistensi perencanaan terkait Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	5 Dokumen	---	---	---	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
5 01 03 01.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Capaian TPB/ SDGs Tahun 2021 Provinsi Lampung	10 Perangkat Daerah	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
5 01 03 01.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	---	---	---	---	---	---	---
5 01 03 01.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Strategi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2022	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 01 03 01.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang di Asistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Prossiding FGD Asistensi Penyusunan Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	2 Dokumen	---	---	---	2 Dokumen	2 Dokumen	100%





Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5 01 03 01.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2021	6 Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 01 03 01.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Profil Kemiskinan di 5 Kabupaten/ Kota Tahun 2021 dan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Tahun 2022	2 Laporan	---	---	---	---	---	---	---
5 01 03 01.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100 %							
5 01 03 01.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Daerah dan Buku Peluang Investasi	2 Dokumen	2 Dokumen	---	---	---	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 01 03 01.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Dokumen Analisis dan Strategis Kebijakan Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung dan Dokumen Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung	5 Perangkat Daerah	3 Laporan	---	---	---	3 Laporan	3 Laporan	100%
5 01 03 01.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan dokumen Laporan Movev serta Buku Statistik Perekonomian (tahunan n-1 dan triwulanan)	5 Perangkat Daerah	10 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
5 01 03 01.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Kajian Dukungan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	2 Dokumen	---	---	---	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 01 03 01.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
5 01 03 01.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Dokumen Analisis Ekonomi Berbasis Agribisnis dalam Mendukung Pembangunan Daerah	4 Perangkat Daerah	3 Dokumen	---	---	---	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
5 01 03 01.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Movev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor	4 Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%





Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021		
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan Jumlah dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB									
5	01 03 01.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Analisis Dukungan Pembangunan Pariwisata Terhadap Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	---	---	---	1 Laporan	1 Laporan	100%
5	01 03 01.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %							
5	01 03 01.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Kajian Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5	01 03 01.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan program IPDMIP yang jadi Kewenangan BAPPEDA Provinsi Lampung	4 Perangkat Daerah	---	---	---	---	---	---	
5	01 03 01.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	01 03 01.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	---	---	---	---	---	---	
5	01 03 01.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Profil Infrastruktur Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Keciptakarya Provinsi Lampung	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5	01 03 01.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	3 Dokumen	---	---	---	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
5	01 03 01.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%





Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5 01 03 01.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Dokumen Laporan Proceeding hasil pemeriksaan validasi Dokumen KLHS Kabupaten/Kota dan Pokja Pengendalian TKPRD Provinsi Lampung	2 Laporan	---	---	---	---	---	---	---
SASARAN PENDUKUNG : MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KINERJA INSTANSI BAPPEDA										
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %							
5 01 01 01.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu	100 %							
5 01 01 01.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan, Rencana Aksi, PK Murni, PK Perubahan, Renja RB)	11 Dokumen	24 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	100%
5 01 01 01.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (LKJ, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Evaluasi Hasil Renja Triwulan, Evaluasi Renja RB)	7 Laporan	20 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
5 01 01 01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Keuangan yang tepat waktu	100 %							
5 01 01 01.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	115 Orang	12 Bulan	---	---	---	12 Bulan	12 Bulan	100%
5 01 01 01.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	2 Laporan	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 01 01 01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu	100 %							
5 01 01 01.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Dokumen	---	---	---	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
5 01 01 01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah	100 %							
5 01 01 01.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	275 Paket	341 Stel	150 Stel	147 Stel	98,00%	164 Stel	164 Stel	100%
5 01 01 01.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang	65 Orang	30 Orang	26 Orang	86,67%	40 Orang	39 Orang	97,50%





Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5 01 01 01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran	100 %							
5 01 01 01.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5 01 01 01.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5 01 01 01.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5 01 01 01.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5 01 01 01.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5 01 01 01.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	495 Kali	200 Kali	179 Kali	89,50%	350 Kali	316 Kali	90,29%
5 01 01 01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %							
5 01 01 01.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	116 Unit	82 Unit	38 Unit	38 Unit	100%	44 Unit	44 Unit	100%
5 01 01 01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran	100 %							
5 01 01 01.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5 01 01 01.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5 01 01 01.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5 01 01 01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran	100 %							
5 01 01 01.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14 Unit	32 Unit	17 Unit	16 Unit	94,12%	17 Unit	16 Unit	94,12%
5 01 01 01.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	270 Unit	516 Unit	---	---	---	554 Unit	516 Unit	93,14%
5 01 01 01.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi Musholla + Ruang Laktasi dan Kamar Mandi Lt. I dan II	2 Unit	8 Paket	---	---	---	8 Paket	8 Paket	100%





2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

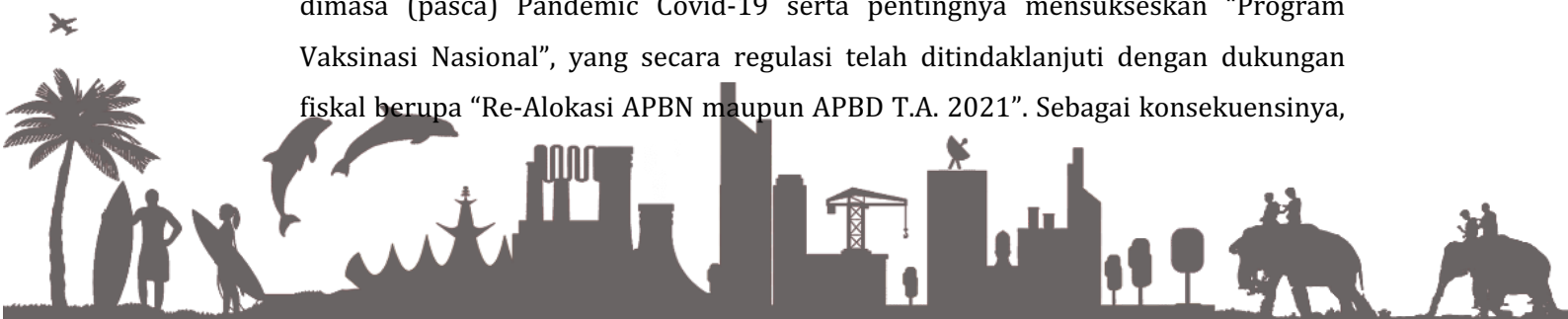
Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang utama berkaitan dengan fungsi penunjang pemerintahan daerah bidang perencanaan yaitu fokus pada : (1) Perumusan kebijakan dan Penyusunan rencana pembangunan daerah, (2) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, OPD dan Kabupaten/Kota, (3) Pembinaan pada OPD dan Kabupaten/Kota. Pada tabel berikut ini disajikan data Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Tahun 2019-2024

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
SASARAN UTAMA												
1.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	--	--	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
2.	Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	--	--	30%	30%	30%	31%	29,45%	23,92%	30%	31%	
3.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	--	--	100%	100%	100%	100%	81,25%	100%	100%	100%	
4.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD	--	--	100%	100%	100%	100%	81,25%	100%	100%	100%	
5.	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	--	--	80%	85%	90%	95%	46,15%	100%	90%	95%	
SASARAN PENDUKUNG												
1.	Nilai SAKIP (Bappeda)	--	--	BB	BB	BB	A	BB	BB	BB	A	

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa pada awal periode Tahun 2021 pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang “Pemulihan Ekonomi Nasional” dimasa (pasca) Pandemic Covid-19 serta pentingnya mensukseskan “Program Vaksinasi Nasional”, yang secara regulasi telah ditindaklanjuti dengan dukungan fiskal berupa “Re-Alokasi APBN maupun APBD T.A. 2021”. Sebagai konsekuensinya,



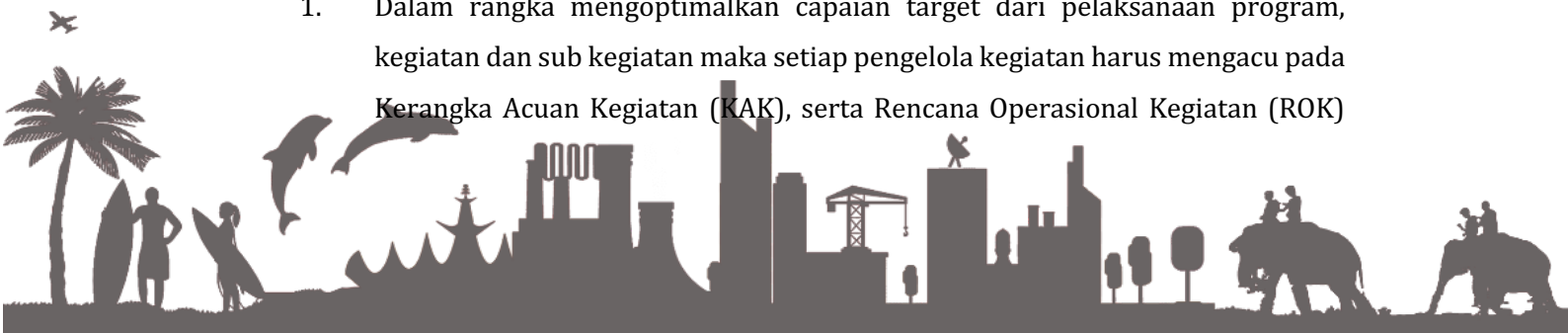


terdapat beberapa hambatan yang dihadapi BAPPEDA Provinsi Lampung dalam melaksanakan Program dan kegiatan. Namun secara prinsip keadaan tersebut tidak menimbulkan hambatan berarti dalam pelaksanaan tugas pokok BAPPEDA sebagai lembaga yang menjalankan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah. Meski demikian, terdapat beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi BAPPEDA Provinsi Lampung dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi dan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra, antara lain :

1. Pada aspek perencanaan kegiatan, meskipun pengelola kegiatan telah menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK); namun kondisi lingkungan eksternal di masa pandemic Covid-19 yang telah menghadirkan kebijakan dan regulasi yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang **harus dipatuhi oleh perangkat daerah dan pelaksana kegiatan**. Secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut berdampak pada munculnya “keterbatasan” teknis operasional pelaksanaan kegiatan bagi pengelola kegiatan.
2. Pada aspek pelaksanaan, dengan adanya kebijakan dan regulasi pemerintah maka secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut berdampak pada munculnya “keterbatasan” teknis operasional pelaksanaan kegiatan bagi pengelola kegiatan. Namun hal tersebut tidak berdampak pada pencapaian output yang telah ditetapkan dari masing-masing sub kegiatan.
3. Memperhatikan kebijakan realokasi anggaran (rasionalisasi anggaran) yang ditempuh oleh pemerintah di masa pandemic, maka terdapat beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian (mengurangi) jumlah *output*, yang secara logis akan berpengaruh terhadap capaian dari target *output* yang telah ditetapkan.

Rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021.

1. Dalam rangka mengoptimalkan capaian target dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan maka setiap pengelola kegiatan harus mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK)





- dan Rencana Arus Kas (RAK) yang telah disusun, sekaligus mensosialisasikannya kepada seluruh anggota personil Tim Kerja Pelaksana Kegiatan;
2. Mengingat bahwa pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, maka para pengelola sub kegiatan diharapkan pula dapat merancang rencana capaian target secara triwulanan;
 3. Penetapan indikator dan target dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan *baseline* dalam penetapan Perjanjian Kinerja bagi ASN. Oleh karenanya, konsistensi antara indikator dan target program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Perjanjian Kinerja ASN merupakan hal yang penting;
 4. Dalam rangka mendukung kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan, pengelola kegiatan juga diminta untuk dapat menyampaikan berkas laporan administrasi penatausahaan keuangan secara disiplin (lengkap, akurat dan tepat waktu);
 5. Ditengah kondisi pandemic Covid-19 yang belum berakhir dan kondisi keuangan daerah yang belum stabil, pengelola sub kegiatan perlu senantiasa memperkuat kemampuan manajerial dan kemampuan teknis; sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan substantif.

Dalam melaksanakan hal- hal di atas, fungsi strategis BAPPEDA dapat berjalan dengan optimal apabila di dukung dengan segala sumber daya yang menjadi potensi BAPPEDA dalam meningkatkan kualitas kinerjanya sebagai organisasi Perangkat Daerah. Faktor eksternal dan internal baik sebagai kelemahan maupun kekuatan sangat menentukan bagaimana BAPPEDA dapat melaksanakan tugas organisasinya secara optimal.

Tabel 2.4 Analisis Lingkungan Internal

Aspek	Kekuatan	Kelemahan
Sistem/ Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">• SIPPKD (integrasi dari sistem perencanaan s/d penganggaran)• Simonev (sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan)	<ul style="list-style-type: none">• Belum terintegrasinya antara perencanaan dan evaluasi nya• Belum ada instrumen yang jelas dalam mengatur tentang indeks perencanaan
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">• Adanya tugas atau peran hasil dari fungsional perencana yang	Belum jelas pola hubungan kerja antara fungsional dan fungsional umum/ pelaksana

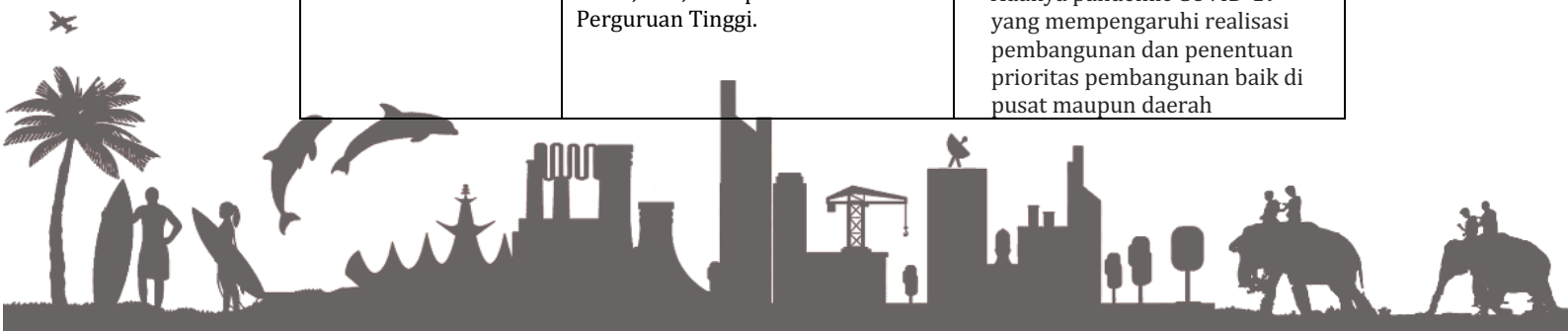




Aspek	Kekuatan	Kelemahan
	dapat membantu pelaksanaan tugas BAPPEDA <ul style="list-style-type: none"> • Adanya koordinator fungsional perencana 	
Sumberdaya Manusia	Jumlah Pegawai BAPPEDA terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Struktural • Fungsional Sub Koordinator • Fungsional Perencana • Pelaksana; dan • Non PNS 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya tenaga administrasi; • Penempatan pegawai yang belum sesuai dengan kompetensi pendidikan nya; • Fungsional perencana yang belum merata penempatan nya pada setiap bidang.
Sumberdaya Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran APBD disesuaikan dengan kebutuhan; • Bappeda juga mendapat ABPN dari Pusat 	Anggaran yang di gunakan untuk peningkatan kompetensi SDM masih sangat minim;
Lingkungan Strategis	Dukungan dari seluruh ASN yang berada di BAPPEDA dalam melaksanakan tupoksi sehingga bisa berjalan dengan baik	Perlu mengoptimalkan Tim PPID BAPPEDA Provinsi Lampung dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait perencanaan pembangunan.

Tabel 2.5 Analisis Lingkungan Eksternal

Aspek	Peluang	Tantangan
Sistem/ Kebijakan	Setiap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, ditingkat kabupaten/ kota harus melalui provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian / Lembaga) terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan ditingkat daerah serta terbitnya peraturan-peraturan baru di pusat utamanya terkait perencanaan; • Adanya perbedaan antara kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah.
Kelembagaan	BAPPEDA sebagai Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan	Masih terdapat beberapa fungsi kelembagaan yang sama antara BAPPEDA dengan OPD yang lain sehingga menimbulkan ketidakefektifan kinerja
Sumberdaya Manusia	Bappeda bekerjasama dengan Pemerintah Pusat (Pusbindiklatren) dalam peningkatan kapasitas SDM dengan penawaran diklat yang disesuaikan dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilakukan penambahan kuota fungsional perencana • Belum mengusulkan fungsiona lain seperti : fungsional arsiparis, Analis kebijakan, pustakawan, dll.
Lingkungan Strategis	Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BAPPEDA mempunyai hubungan baik dan berkolaborasi dengan mitra terkait yaitu: - Instansi vertikal : Kementerian Pusat, BPS, Kabupaten Kota - Perguruan Tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dinamika pembangunan yang cukup tinggi dan berimplikasi terhadap penyesuaian dokumen penataan ruang; • Adanya pandemic COVID-19 yang mempengaruhi realisasi pembangunan dan penentuan prioritas pembangunan baik di pusat maupun daerah





2.5 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke 4 dari Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 mengusung Tema “*Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah*”, akan menjadi salah satu bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Setelah lebih dari satu tahun kita mengalami dampak dari krisis Covid-19, tentunya pemerintah daerah perlu bekerja secara lebih efektif dan progresif dalam mengatasi, mengendalikan, hingga memutus rantai penyebaran Virus di berbagai titik lokasi maupun wilayah.

Pemulihan kesehatan masyarakat merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dalam banyak aspek. Disisi tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan, pandemi Covid-19 yang semula dipandang sebagai masalah kesehatan, ternyata telah meluas pada masalah sosial, masalah ekonomi, bahkan ke sektor fiskal pemerintah daerah. Oleh karenanya, diperlukan reformulasi terhadap kebijakan dan strategi pembangunan, serta penyesuaian terhadap kerangka pendanaan dan target kinerja; yang perlu dituangkan secara formal ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, termasuk program dan kegiatan yang dirumuskan oleh perangkat daerah.

Memperhatikan pokok uraian tersebut, penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDA tentunya perlu mendukung dan sejalan dengan visi dan misi RPJMD 2019-2024 maupun tugas dan fungsi urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh BAPPEDA, dimana BAPPEDA terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu “**Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik**”. Tinjauan terhadap RKPD Provinsi Lampung mengisyaratkan bahwa pembangunan di tahun 2023 akan berfokus pada pemulihan kesehatan guna mendukung perbaikan ekonomi daerah dan kualitas kehidupan





sosial. Disaat yang bersamaan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga diarahkan pada pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, guna mendukung pencapaian visi-misi pemerintah daerah, penyusunan kerangka pokok rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDA tahun 2023 juga diselaraskan Perubahan Renstra BAPPEDA dan pokok arahan dalam RKPD Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:





Tabel 2.6 Reviu terhadap RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	5.445.398.310	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	2.741.775.100	
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	1.682.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	893.885.000	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Lampung	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 Berita Acara	220.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Lampung	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 Berita Acara	122.620.000	
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Lampung	Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	517.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Lampung	Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	268.955.000	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi yang ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	2 Dokumen	945.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Lampung	Jumlah dokumen RKPD (Murni dan Perubahan)	2 Dokumen	502.310.000	
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Lampung	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	100%	1.872.228.400	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Lampung	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	100%	1.281.247.000	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Lampung	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	3 Masukan	222.028.400	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Lampung	Jumlah masukan data dan informasi serta keterisian E-Database N-1	3 Masukan	120.260.500	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Lampung	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	75 Orang	605.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Lampung	Jumlah pengelola data dan informasi di SKPD serta jumlah dokumen kajian PNBPD Data Spasial Provinsi Lampung dan Dokumen Peta Tematik	75 Orang	561.185.500	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung	Jumlah sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	60 Orang	238.700.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung	Jumlah pengelola data dan informasi di Kabupaten/ Kota	60 Orang	189.238.000	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Lampung	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan	2 Buku	806.500.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Lampung	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan dan Dokumen Satu Data Indonesia (SDI)	2 Buku	410.563.000	
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Lampung	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota	100%	1.591.169.910	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Lampung	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota	100%	566.643.100	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Lampung	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	2 Laporan	326.205.990	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Lampung	Jumlah Laporan Dekon/TP/ DAK dan laporan monitoring	2 Laporan	50.358.900	





RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Lampung	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	3 Laporan	708.125.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Lampung	Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Program serta Kegiatan APBD yang dimonitoring dan Dokumen Evaluasi RKP Tahun 2022	3 Laporan	272.575.000	
Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota yang difasilitasi/ evaluasi	3 Dokumen	556.838.920	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung	Jumlah dokumen hasil fasilitas Musrenbang Kab/ Kota, Dokumen hasil fasilitasi RKP dan RKP Perubahan Kab/Kota	3 Dokumen	243.709.200	
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100%	300.000.000	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100%	300.000.000	
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Lampung	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	1 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Lampung	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	1 Dokumen	100.000.000	
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	100.000.000	
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	100.000.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	100.000.000	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan money pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100%	7.539.090.460	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan money pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100%	4.337.148.100	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	100%	2.074.160.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	100%	1.581.422.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	1 Dokumen	355.850.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Lampung	Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	96.922.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	199.650.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan dokumen asistensi perencanaan terkait Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	220.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	222.750.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Capaian TPB/ SDGs Tahun 2021 Provinsi Lampung	10 Perangkat Daerah	214.180.000	





RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPd/ RPJMD pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	245.850.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung	Jumlah Dokumen Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	150.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen	404.910.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Lampung	Jumlah Dokumen Strategi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2022	1 Dokumen	299.980.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	199.650.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang di Asistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Prosiding FGD Asistensi Penyusunan Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	200.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	222.750.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2021	6 Perangkat Daerah	94.688.200	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPd/ RPJMD pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	222.750.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung	Jumlah Dokumen Profil Kemiskinan di 5 Kabupaten/ Kota Tahun 2021 dan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Tahun 2022	2 Laporan	305.651.800	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100%	2.326.465.460	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100%	955.305.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen	404.877.110	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Lampung	Jumlah Dokumen Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Daerah dan Buku Peluang Investasi	2 Dokumen	182.847.300	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	339.105.140	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Dokumen Analisis dan Strategis Kebijakan Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung dan Dokumen Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung	5 Perangkat Daerah	151.640.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	328.955.880	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan dokumen Laporan Monev serta Buku Statistik Perekonomian (tahunan n-1 dan triwulanan)	5 Perangkat Daerah	79.114.600	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Lampung	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPd/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	154.672.540	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Lampung	Jumlah Dokumen Kajian Dukungan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	158.549.900	





RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	196.850.500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	Jumlah dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	41.879.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	187.440.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Dokumen Analisis Ekonomi Berbasis Agribisnis dalam Mendukung Pembangunan Daerah	4 Perangkat Daerah	141.696.400	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	395.323.500	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan Jumlah dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB	4 Perangkat Daerah	83.022.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Lampung	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	319.240.790	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Lampung	Jumlah Dokumen Analisis Dukungan Pembangunan Pariwisata Terhadap Pembangunan Daerah	1 Laporan	116.555.800	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100%	3.138.465.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100%	1.674.646.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	648.368.600	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	Jumlah Dokumen Kajian Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	366.391.900	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	165.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan program IPDMIP yang jadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung	4 Perangkat Daerah	500.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	222.750.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	13.936.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	199.650.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	26.256.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Wilayah yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	716.650.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	Jumlah Dokumen Profil Infrastruktur Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Keciptakarya Provinsi Lampung	1 Dokumen	357.892.100	





RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	199.650.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	103.792.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	222.750.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	36.212.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPd/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	763.646.400	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Dokumen Laporan Proceeding hasil pemeriksaan validasi Dokumen KLHS Kabupaten/Kota dan Pokja Pengendalian TKPRD Provinsi Lampung	1 Laporan	270.166.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	21.120.336.653	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	25.777.917.082	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu	100%	646.773.600	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu	100%	345.198.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	11 Dokumen	388.507.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan, Rencana Aksi, PK Murni, PK Perubahan, Renja RB)	11 Dokumen	207.287.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Laporan	258.265.700	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (LKj, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Evaluasi Hasil Renja Triwulan, Evaluasi Renja RB)	7 Laporan	137.911.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen Keuangan yang tepat waktu	100%	17.387.175.607	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen Keuangan yang tepat waktu	100%	15.597.369.400	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	115 Orang	17.274.509.207	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	115 Orang	15.494.945.400	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lampung	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	2 Laporan	112.666.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lampung	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	2 Laporan	102.424.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu	100%	60.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu	100%	55.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lampung	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 Laporan	60.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lampung	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 Laporan	55.000.000	





RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lampung	Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah	100%	242.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lampung	Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah	100%	166.195.040	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Lampung	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	130 Paket	132.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Lampung	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	275 Paket	139.750.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lampung	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 Orang	110.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lampung	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang	26.445.040	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lampung	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran	100%	738.687.446	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lampung	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	6.252.611.242	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lampung	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	220.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lampung	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	1.574.151.600	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lampung	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	11.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lampung	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	10.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lampung	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	22.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lampung	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 Paket	16.580.000	
Penyediaan Bahan/Material	Lampung	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 Paket	33.039.985	Penyediaan Bahan/Material	Lampung	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Paket	19.953.950	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lampung	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	66.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lampung	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	79.200.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	386.647.461	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	4.552.725.692	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	141.900.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	880.494.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	25 Unit	141.900.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	116 Unit	880.494.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran	100%	1.334.800.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran	100%	1.661.363.800	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lampung	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	466.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lampung	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	424.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lampung	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	55.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lampung	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	27.790.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lampung	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	813.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lampung	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	1.209.573.800	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran	100%	568.500.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran	100%	819.685.600	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lampung	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14 Unit	262.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lampung	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14 Unit	341.570.000	





RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	250 Unit	44.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	250 Unit	21.778.600		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lampung	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Paket	261.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lampung	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi Musholla + Ruang Laktasi dan Kamar Mandi Lt. I dan II	3 Paket	456.337.000		
TOTAL				30.731.065.182	TOTAL				32.731.065.182		





2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan Sub kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Hasil penelaahan terhadap usulan pemangku kepentingan, usulan lebih banyak ditujukan untuk perangkat daerah teknis terkait infrastruktur dan pertanian. Khusus usulan pemangku kepentingan yang ditujukan untuk Bappeda Provinsi Lampung secara substansi hanya berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Lampung. Usulan DPRD Provinsi Lampung menekankan untuk memaksimalkan fungsi aplikasi e-Pokir sehingga hasil Reses Anggota DPRD dapat segera diusulkan dan dibahas melalui aplikasi e Reses. Memastikan aplikasi e-Reses dapat menjamin seluruh program dan kegiatan usulan masyarakat dapat diakomodir dalam RKPD Provinsi Lampung.





TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa Visi Pembangunan Nasional adalah : ***“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”***. Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:





Selanjutnya, RPJMN 2020-2024 sebagai titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, maka penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian peningkatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan 9 (sembilan) misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia Maju, yaitu :



1

Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global

2

Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3

Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menertibkan 2 Undang-undang, Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

4

Penyederhanaan Birokasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi

5

Transformasi Ekonomi








Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tahun 2022 ini bangsa Indonesia masih menghadapi bencana global yakni Covid-19, namun terjadi perbaikan kondisi dimana saat ini Indonesia sedang bersiap dari kondisi pandemi ke endemi Covid-19. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kesadaran dari masyarakat terhadap kesehatannya yang menunjukkan peningkatan. Diharapkan dengan kondisi yang semakin membaik ini dapat berdampak positif pada capaian makro pembangunan Indonesia.





Dengan mempertimbangkan kondisi terkini, maka untuk menjabarkan RPJMN 2020-2024 secara tahunan, pemerintah telah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** melalui 7 (tujuh) prioritas nasional, meliputi :

 <p>PN 1</p> <p>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</p>	 <p>PN 2</p> <p>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</p>	 <p>PN 3</p> <p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p>	 <p>PN 4</p> <p>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p>
 <p>PN 5</p> <p>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p>	 <p>PN 6</p> <p>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</p>	 <p>PN 7</p> <p>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p>	

Guna mendukung pokok-pokok prioritas pembangunan nasional tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 diarahkan pada beberapa fokus pembangunan yang meliputi : industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial dan reformasi pendidikan dan keterampilan.



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA Provinsi Lampung

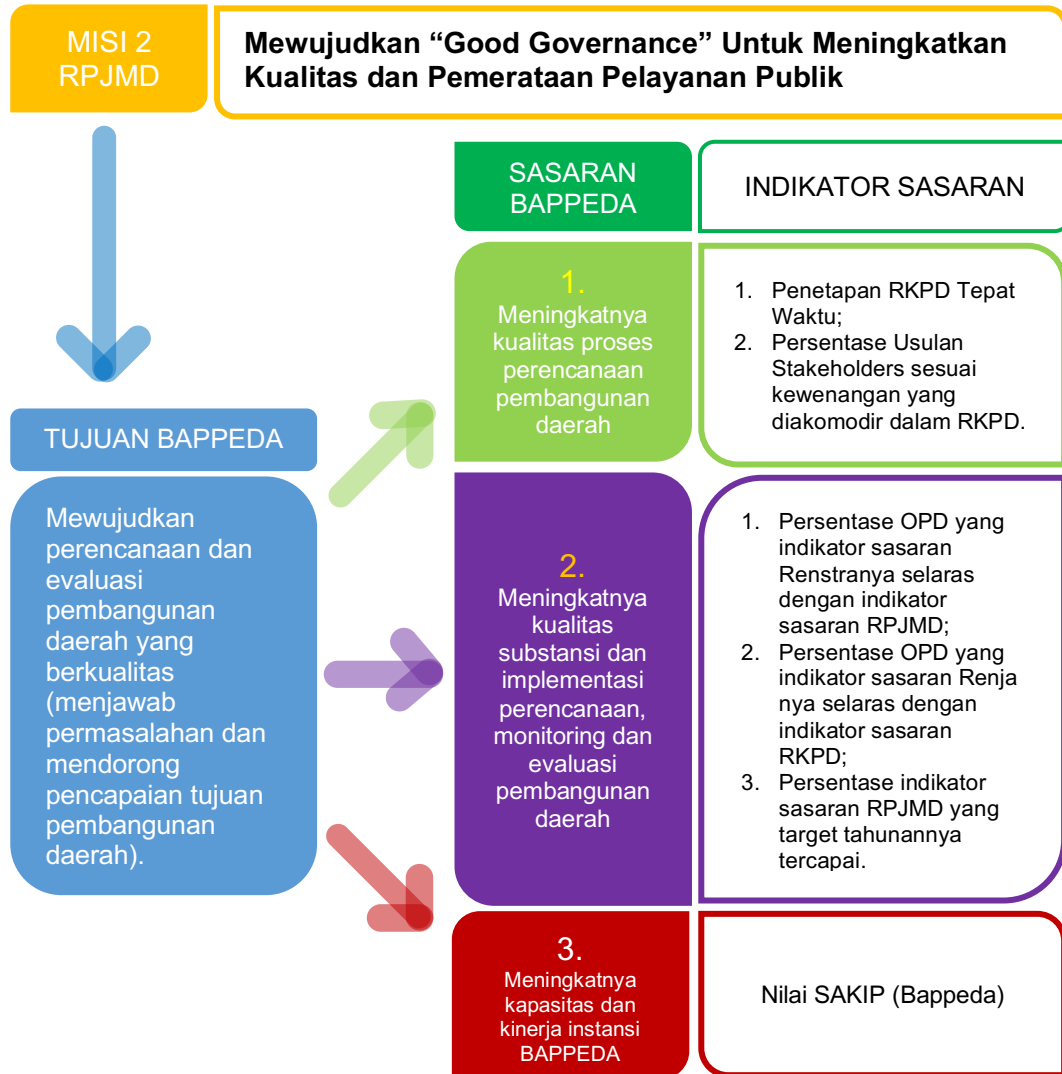
Mengacu pada Visi dan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 serta Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Pemerintahan urusan Perencanaan mendukung pencapaian Misi ke- 2 RPJMD Provinsi Lampung, yaitu **“Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”** dengan Sasaran pada Perubahan RPJMD yaitu **“Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi”**.

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perubahan RPJMD

Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator
Misi 2 : Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh BAPPEDA selama Tahun 2019– 2024 adalah **“Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas”**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai lembaga perencana pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (planning by research).





Gambar 3.1 Cascading Misi P RPJMD s/d Tujuan dan Sasaran BAPPEDA

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung. Sasaran merupakan penjabaran tujuan. Sasaran harus *mempunyai* indikator sasaran dengan target yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tahunan.



Tujuan yang ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung untuk mencapai visi misi Provinsi Lampung ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
RPJMD Provinsi Lampung								
✚ Misi ke- 2: “Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik” ✚ Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ✚ Sasaran : Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi ✚ Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi								
RENSTRA OPD								
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPDP Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPDP	30%	30%	30%	31%	32%
		Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPDP;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	80%	85%	90%	95%	95%
Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP Bappeda	BB	BB	BB	A	A		





3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka seluruh nomenklatur Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan Renja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan proses “pemetaan” sebagaimana telah diatur dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tersebut. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa pada Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 akan melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan.

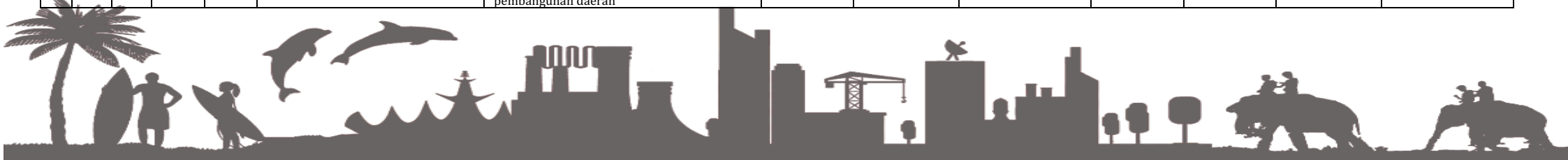
Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana Program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk BAPPEDA tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:





**Tabel 3.3 Rumusan Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Berdasarkan
Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021**

KODE	URUSAN/ BIDANG/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PROSES PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH												
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	01				PERENCANAAN							
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		100 %		100 %			
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		100 %	1.744.000.000	100 %	3.360.200.000		
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	Lampung	1 Berita Acara	190.000.000	APBD	1 Berita Acara	242.000.000
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi	Lampung	1 Berita Acara	400.000.000	APBD	1 Berita Acara	568.700.000
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi yang ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	Lampung	2 Dokumen	1.154.000.000	APBD	2 Dokumen	2.549.500.000
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan		100 %	1.600.594.000			2.072.228.400
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Lampung	3 Masukan	258.366.000	APBD	3 Masukan	222.028.400
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	Lampung	75 Orang	505.000.000	APBD	75 Orang	605.000.000
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Lampung	60 Orang	337.000.000	APBD	60 Orang	238.700.000





KODE					URUSAN/ BIDANG/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan	Lampung	2 Buku	500.228.000	APBD		2 Buku	1.006.500.000
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota		100%	1.615.758.100				1.750.286.901
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Lampung	2 Laporan	289.950.900	APBD		2 Laporan	358.826.589
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Lampung	3 Laporan	832.990.000	APBD		3 Laporan	778.937.500
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota yang difasilitasi/ evaluasi	Lampung	3 Dokumen	492.817.200	APBD		3 Dokumen	612.522.812
5	01	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah			400.000.000				400.000.000
5	01	02	1.03	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	Lampung	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
5	01	02	1.03	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Lampung	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
5	01	02	1.03	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Lampung	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS SUBSTANSI DAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBAGUNAN DAERAH													
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan		100 %				100 %	



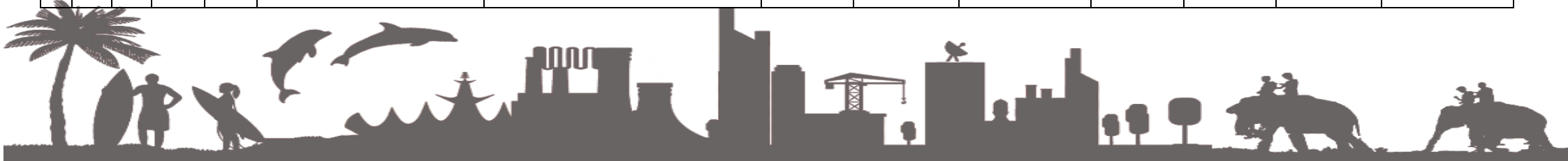


KODE					URUSAN/ BIDANG/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						yang mendukung kinerja pembangunan daerah							
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia		100 %	2.402.350.000			100 %	2.281.576.000
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	1 Dokumen	233.488.200	APBD		1 Dokumen	391.435.000
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	Lampung	10 Perangkat Daerah	205.472.000	APBD		10 Perangkat Daerah	219.615.000
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	Lampung	10 Perangkat Daerah	538.713.800	APBD		10 Perangkat Daerah	245.025.000
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	Lampung	1 Laporan	154.000.000	APBD		1 Laporan	270.435.000
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	1 Dokumen	580.916.000	APBD		1 Dokumen	445.401.000
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	Lampung	6 Perangkat Daerah	200.000.000	APBD		6 Perangkat Daerah	219.615.000
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	Lampung	6 Perangkat Daerah	284.108.200	APBD		6 Perangkat Daerah	245.025.000
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	Lampung	2 Laporan	205.651.800	APBD		2 Laporan	245.025.000





KODE	URUSAN/ BIDANG/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
5	01 03 1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		100 %	2.131.718.600			100 %	2.559.112.006
5	01 03 1.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	2 Dokumen	373.000.000	APBD		2 Dokumen	445.364.821
5	01 03 1.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung	5 Perangkat Daerah	208.948.400	APBD		5 Perangkat Daerah	373.015.654
5	01 03 1.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung	5 Perangkat Daerah	205.557.000	APBD		5 Perangkat Daerah	361.851.468
5	01 03 1.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Lampung	1 Laporan	390.106.000	APBD		1 Laporan	170.139.794
5	01 03 1.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	1 Dokumen	236.726.000	APBD		1 Dokumen	216.535.550
5	01 03 1.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung	4 Perangkat Daerah	326.966.200	APBD		4 Perangkat Daerah	206.184.000
5	01 03 1.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung	4 Perangkat Daerah	257.898.000	APBD		4 Perangkat Daerah	434.855.850
5	01 03 1.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Lampung	1 Laporan	132.517.000	APBD		1 Laporan	351.164.869



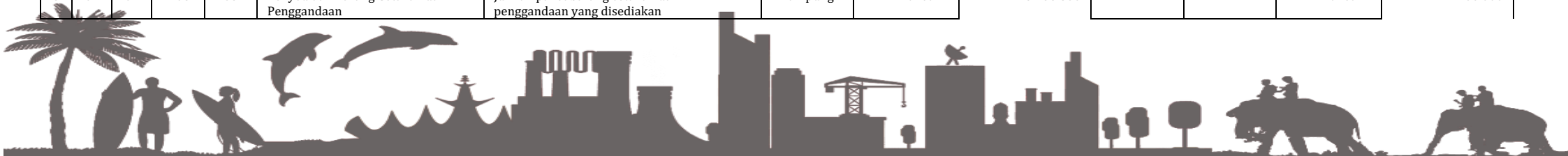


KODE	URUSAN/ BIDANG/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
													(1)
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100 %	2.869.900.000			100 %	3.452.311.500
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	1 Dokumen	482.000.000	APBD		1 Dokumen	713.205.460
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	Lampung	4 Perangkat Daerah	500.000.000	APBD		4 Perangkat Daerah	181.500.000
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	Lampung	4 Perangkat Daerah	260.000.000	APBD		4 Perangkat Daerah	245.025.000
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Lampung	1 Laporan	158.000.000	APBD		1 Laporan	219.615.000
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	1 Dokumen	569.900.000	APBD		1 Dokumen	788.315.000
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	Lampung	5 Perangkat Daerah	200.000.000	APBD		5 Perangkat Daerah	219.615.000
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	Lampung	5 Perangkat Daerah	200.000.000	APBD		5 Perangkat Daerah	245.025.000
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Lampung	1 Laporan	500.000.000	APBD		1 Laporan	840.011.040





KODE	URUSAN/ BIDANG/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
SASARAN 3 (PENDUKUNG) : MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KINERJA BAPPEDA													
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %				100 %	
5	01	01	1.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu		100 %	637.976.000			100 %	711.450.960
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Lampung	11 Dokumen	383.189.000	APBD		11 Dokumen	427.358.690
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Lampung	7 Laporan	254.787.000	APBD		7 Laporan	284.092.270
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Keuangan yang tepat waktu		100 %	15.658.728.092			100 %	18.369.393.661
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Lampung	115 Orang	15.494.945.400	APBD		115 Orang	18.245.460.621
5	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Lampung	2 Laporan	163.782.692	APBD		2 Laporan	123.933.040
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu		100 %	41.080.000			100 %	66.550.000
5	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Lampung	3 Laporan	41.080.000	APBD		3 Laporan	66.550.000
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah		100 %	391.387.000			100 %	266.200.000
5	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Lampung	275 Paket	165.850.000	APBD		275 Paket	145.200.000
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Lampung	50 Orang	225.537.000	APBD		50 Orang	121.000.000
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran		100 %	736.068.490			100 %	1.020.556.191
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Lampung	12 Paket	115.328.140	APBD		12 Paket	450.000.000
5	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Lampung	12 Paket	25.579.000	APBD		12 Paket	12.100.000
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Lampung	12 Paket	25.486.600	APBD		12 Paket	24.200.000





KODE	URUSAN/ BIDANG/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF				
			(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Lampung	12 Paket	30.815.750	APBD		12 Paket	36.343.984				
5 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Lampung	1 Laporan	184.800.000	APBD		1 Laporan	72.600.000				
5 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lampung	1 Laporan	354.059.000	APBD		1 Laporan	425.312.207				
5 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	45.327.500			100 %	156.090.000				
5 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Lampung	116 Unit	45.327.500	APBD		116 Unit	156.090.000				
5 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran		100 %	2.430.654.000			100 %	1.529.513.800				
5 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lampung	1 Laporan	424.000.000	APBD		1 Laporan	513.040.000				
5 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Lampung	1 Laporan	66.675.000	APBD		1 Laporan	60.500.000				
5 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lampung	1 Laporan	1.939.979.000	APBD		1 Laporan	955.973.800				
5 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran		100 %	697.023.400			100 %	1.274.776.199				
5 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Lampung	14 Unit	337.434.000	APBD		14 Unit	289.190.000				
5 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Lampung	250 Unit	26.400.000	APBD		250 Unit	48.400.000				
5 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Lampung	3 Paket	333.189.400	APBD		3 Paket	937.186.199				
TOTAL									33.402.565.182				39.177.468.458



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung

Berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, telah ditetapkan Visi dan Misi pembangunan Provinsi Lampung :



MISI 1
Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai

MISI 2
Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik



MISI 3
Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang



MISI 4
Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah



MISI 5
Membangun kekuatan ekonomi masyarakat Berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang Seimbang dengan wilayah perkotaan



MISI 6
Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama



Gambar 4.1 Visi dan Misi Provinsi Lampung



Guna menelaraskan kesinambungan pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan sejalan dengan RKP Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan pula Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 yang bertajuk: **“Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”**. Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung tahun 2023, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; dan
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditentukan dalam cascading BAPPEDA Provinsi Lampung untuk pencapaian tujuan Tahun 2019-2024, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

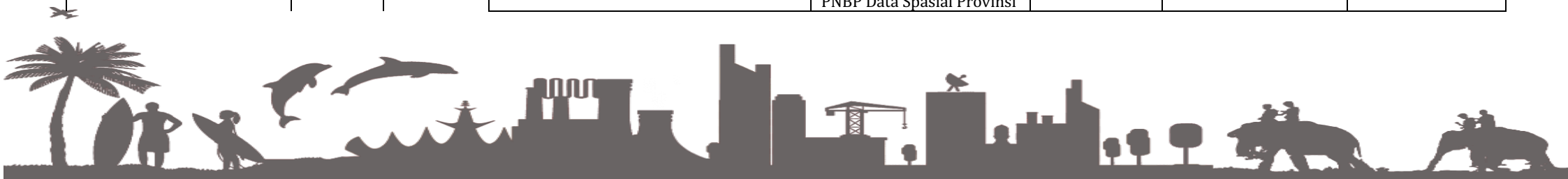
4.2 Rencana Kerja dan Sub Kegiatan Prioritas BAPPEDA Provinsi Lampung

Memperhatikan Prioritas Pembangunan yang terdapat pada RKP tersebut, BAPPEDA sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan berada pada Prioritas ke-4 yaitu “Reformasi Birokrasi”. Untuk itu BAPPEDA menyusun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dicapai pada Tahun 2023 berdasarkan Prioritas yang dukung BAPPEDA yaitu 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan. Berdasarkan uraian tersebut, Rencana Kerja dan Sub Kegiatan Prioritas BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

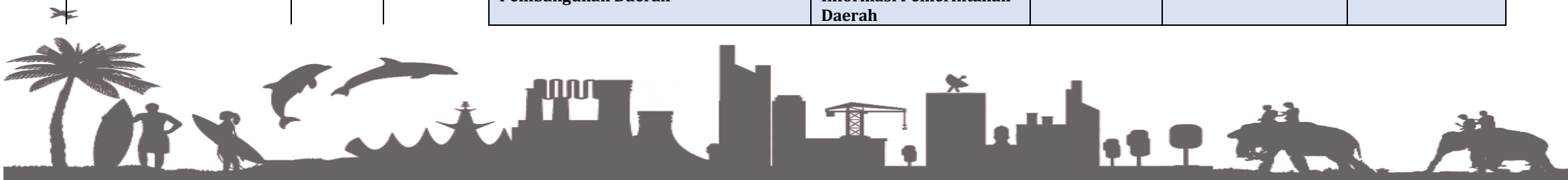


Tabel 4.1 Prioritas BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Provinsi Lampung	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	5.360.352.100			
Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	31%	Provinsi Lampung	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	1.744.000.000			
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 Berita Acara	190.000.000			
			Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	400.000.000			
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen RKPD (Murni dan Perubahan), Ranwal RPJPD 2025-2045, Teknokratis RPJMD 2025-2030	4 Dokumen	1.154.000.000			
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	100 %	1.600.594.000			
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan data dan informasi serta keterisian E-Database N+1	3 Masukan	258.366.000			
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah pengelola data dan informasi di SKPD serta jumlah Dokumen kajian PNBPD Data Spasial Provinsi	75 Orang	505.000.000						



Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Lampung dan Dokumen Peta Tematik			
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola data dan informasi di Kabupaten/ Kota	60 Orang	337.000.000	
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan dan Dokumen Satu Data Indonesia (SDI)	2 Buku	500.228.000	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota	100%	1.615.758.100	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Dekon/TP/DAK dan Laporan Monitoring	2 Laporan	289.950.900	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD, Evaluasi RPJMD 2019-2024	3 Laporan	832.990.000	
			Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Musrenbang Kabupaten/Kota, Dokumen Hasil Fasilitasi RKPD Murni dan RKPD Perubahan Kab/Kota	3 Dokumen	492.817.200	
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah		400.000.000	

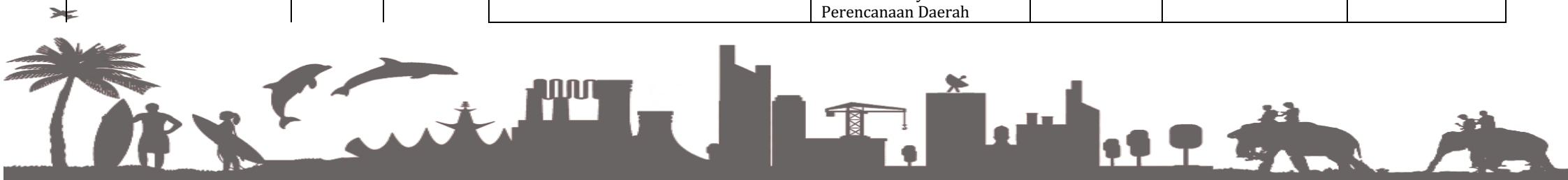




Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	1 Dokumen	150.000.000	
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	100.000.000	
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	150.000.000	
Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	100%	Provinsi Lampung	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	7.403.968.600	
Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD	100%	Provinsi Lampung	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang	100 %	2.402.350.000	



Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemerintahan dan Pembangunan manusia			
Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	95%	Provinsi Lampung	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	233.488.200	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan dokumen asistensi perencanaan terkait Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	205.472.000	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Capaian TPB/ SDGs Tahun 2021 Provinsi Lampung	10 Perangkat Daerah	538.713.800	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	154.000.000	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Strategi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2022	1 Dokumen	580.916.000	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Prossiding FGD Asistensi Penyusunan Perencanaan Daerah	6 Perangkat Daerah	200.000.000	

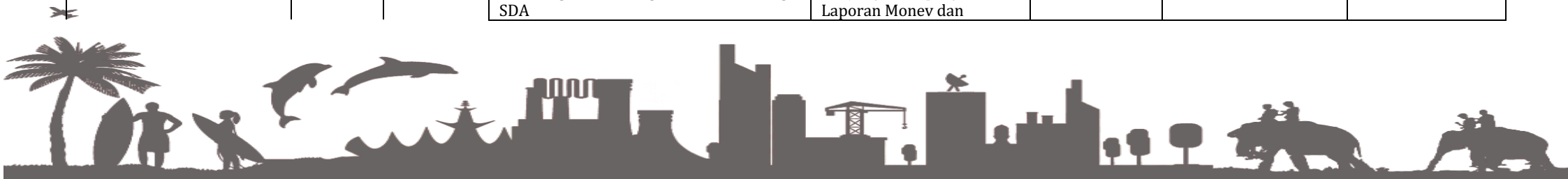




Prioritas Perangkat Daerah (1)	Target (2)	Lokasi (3)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (4)	Indikator (5)	Target (6)	Pagu Indikatif (7)	Keterangan (8)
				Bidang Pembangunan Manusia			
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	284.108.200	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Profil Kemiskinan di 5 Kabupaten/ Kota Tahun 2021 dan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Tahun 2022	2 Laporan	205.651.800	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100 %	2.131.718.600	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Daerah dan Buku Peluang Investasi	2 Dokumen	373.000.000	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Dokumen Analisis dan Strategis Kebijakan Pembangunan Perekonomian Provinsi	5 Perangkat Daerah	208.948.400	



Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Lampung dan Dokumen Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung			
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan dokumen Laporan Monev serta Buku Statistik Perekonomian (tahunan n-1 dan triwulanan)	5 Perangkat Daerah	205.557.000	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Laporan Kajian Dukungan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	390.106.000	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	236.726.000	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Dokumen Analisis Ekonomi Berbasis Agribisnis dalam Mendukung Pembangunan Daerah	4 Perangkat Daerah	326.966.200	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Monev dan	4 Perangkat Daerah	257.898.000	



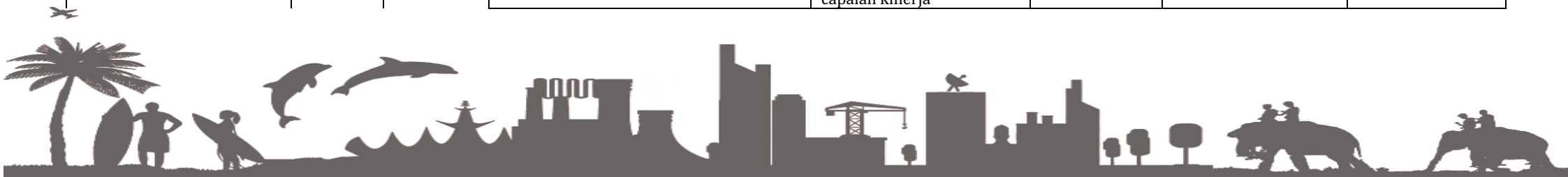


Prioritas Perangkat Daerah (1)	Target (2)	Lokasi (3)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (4)	Indikator (5)	Target (6)	Pagu Indikatif (7)	Keterangan (8)
				Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan Jumlah dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB			
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Dukungan Pembangunan Pariwisata terhadap Pembangunan Daerah	1 Laporan	132.517.000	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	2.869.900.000	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Kajian Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	482.000.000	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan program IPDMIP yang jadi	4 Perangkat Daerah	500.000.000	





Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung			
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	260.000.000	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	158.000.000	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Profil Infrastruktur Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Keciptakarya Provinsi Lampung	1 Dokumen	569.900.000	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	200.000.000	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja	5 Perangkat Daerah	200.000.000	

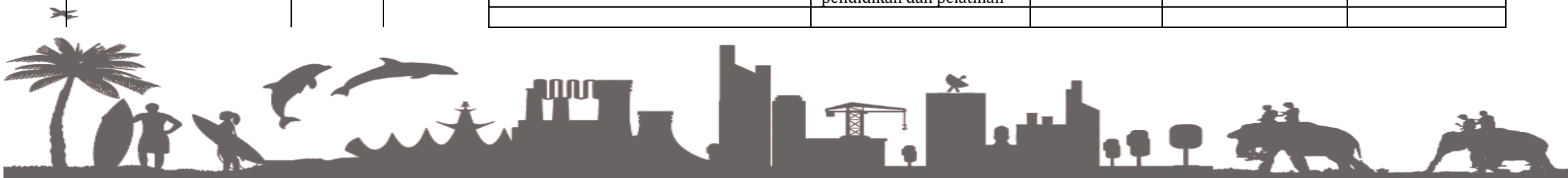




Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				perencanaan di Bidang Kewilayahan			
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Dokumen Laporan Proceeding hasil pemeriksaan validasi Dokumen KLHS Kabupaten/Kota dan Pokja Pengendalian TKPRD Provinsi Lampung	2 Laporan	500.000.000	
Nilai SAKIP	BB	Provinsi Lampung	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	20.638.244.482	
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu	100 %	637.976.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, PK Murni, PK Perubahan, Rencana Aksi, Renja RB, GAP dan GBS, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan)	13 Dokumen	383.189.000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi Kinerja (LKj, Ev. Renstra, Ev. Renja, Ev.	7 Laporan	254.787.000	



Prioritas Perangkat Daerah (1)	Target (2)	Lokasi (3)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (4)	Indikator (5)	Target (6)	Pagu Indikatif (7)	Keterangan (8)
				Rencana Aksi, LPPD/LKPJ, Evaluasi Hasil Renja Triwulan)			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Keuangan yang tepat waktu	100 %	15.658.728.092	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	115 Orang	15.494.945.400	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	2 Laporan	163.782.692	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu	100 %	41.080.000	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 Laporan	41.080.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah	100 %	391.387.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	276 Paket	165.850.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	90 Orang	225.537.000	



Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran	100 %	736.068.490	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	115.328.140	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	25.579.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	25.486.600	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 Paket	30.815.750	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	184.800.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	354.059.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	45.327.500	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	116 Unit	45.327.500	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran	100 %	2.430.654.000	



Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	424.000.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	66.675.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	1.939.979.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran	100 %	697.023.400	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14 Unit	337.434.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	270 Unit	26.400.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	333.189.400	
Jumlah Total						33.402.565.182	





PENUTUP

Penyusunan Renja Tahun 2023 lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (P Renstra) BAPPEDA Provinsi Lampung. Selanjutnya Renja akan menjadi pedoman penyusunan RKA BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2023.

Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan, dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan pelaksana BAPPEDA Provinsi Lampung merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Renja BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2023 harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja BAPPEDA dan kinerja pegawai.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

BAPPEDA Provinsi Lampung dalam hal ini adalah Perangkat Daerah yang mempunyai output untuk menyusun dokumen perencanaan dan mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk penentuan kebijakan Pembangunan di Provinsi Lampung, sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan di BAPPEDA yang sudah disesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 diharapkan tetap bisa berjalan dengan optimal. Untuk itu dalam penyusunan RKA, pelaksanaan hingga tahap pertanggungjawaban perlu dilakukan pengendalian secara intensif dan terus menerus melalui koordinasi, SPIP dan pengawasan.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di BAPPEDA, harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan, antar sub kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program.





5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2023 baik yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung maupun APBN, harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, dan Renstra PD);
- b. Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA Tahun 2023.

5.3 Rencana Tindaklanjut

Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2023, rencana tindaklanjut merupakan faktor penting yang menjadi dasar pelaksanaan Renja tersebut. Rencana tindaklanjut tersebut antara lain :

- a. Dalam rangka menjaga kesimbangan dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, maka perlu diikuti dengan kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- b. Membuka ruang terhadap peran serta stakeholder dalam proses perencanaan sehingga transparansi akan lebih terwujud;
- c. Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BAPPEDA Provinsi Lampung sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

